

PERAN BIROKRASI KELEMBAGAAN DALAM PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU

Oleh : RR. Siti Astuti

ABSTRACT

This study aimed to know the role of institutional bureaucracy in the implementation of integrated pest management. The study was conducted in April 2012 in central Java. IPM institutionalization efforts in Indonesia influenced by a lot of constraints such as constraints conceptual, institutional structures, program priorities, ego-sectoral and ego-discipline and empowerment of farmers. Strategies undertaken by the government is the institutionalization of plant protection, the development of management information systems, strengthening forecasting and observation, the provision of appropriate technology and site-specific duna, provision of protection and stabilization of pest control. The role of institutional bureaucracy in the implementation of IPM in central Java is not optimal because of weak cooperation and coordination among stakeholders as well as good organizational structure has not stabilized both central and local levels as a result of regional autonomy policy. Collaborative efforts and networks need both locally, nationally and globally. Cooperation and networking will provide additional information as a result of the activities of the exchange of information related to IPM.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang berhasil mengembangkan dan menerapkan konsep Pengelolaan Hama Terpadu (PHT). Sistem dan metode pelatihan petani PHT melalui Sekolah Lapangan PHT (SLPHT) yang dikembangkan di Indonesia banyak diadopsi oleh banyak negara berkembang lain di benua Asia dan Afrika. Semua kebijakan dan program yang terkait dengan PHT tersebut semakin meningkatkan citra kepeloporan Indonesia dalam penerapan konsep PHT di tingkat internasional.

Menurut Untung (1996), meskipun Indonesia telah memelopori pengembangan dan penerapan PHT melalui sistem pemberdayaan petani, namun PHT masih belum melembaga di kelembagaan pemerintah pusat, pemerintah

daerah, swasta dan masyarakat. Usaha pelebagaan PHT terbentur oleh banyak kendala antara lain kendala konseptual, struktur kelembagaan, program prioritas, ego-sektoral dan ego-disiplin serta keberdayaan petani. Banyak praktisi, peneliti maupun birokrasi yang menganggap pendekatan PHT sebagai sentimen sektoral dari pakar perlindungan tanaman (Martono, 2006). Kunci PHT terletak pada kata “terpadu”, bukan pada “pengelolaan hama.” Hal ini menyebabkan persepsi, cara pandang dan tingkat kepercayaan terhadap cara melembagakan keberdayaan petani belum optimal. Langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pemasyarakatan dan pelebagaan PHT di semua tingkat pengambilan keputusan.

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui secara mendalam peran birokrasi kelembagaan dalam penerapan PHT adalah deskriptifkuantitatif, yakni mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Brannen, 1997). Lokasi penelitian adalah sentra pertanaman padi di Jawa bagian tengah meliputi beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Sumber data dalam penelitian ini adalah POPT-PHP tanaman pangan, Penyuluh Pertanian yang telah mengikuti SLPHT, pejabat terkait, dan petani padi alumni SLPHT. Penentuan ukuran sampel dilakukan dengan menerapkan dua metode yaitu sensus dan pengambilan sampel acak sederhana. Sensus digunakan dalam pengambilan sampel POPT-PHP sedangkan pengambilan sampel acak sederhana digunakan dalam pengambilan sampel Penyuluh Pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelembagaan Perlindungan Tanaman

Struktur dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten berbeda-beda. Kelembagaan perlindungan tanaman antar kabupaten memiliki perbedaan dalam struktur birokrasinya. Sebagai contoh, perlindungan tanaman menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya peningkatan pertanian di Kabupaten Klaten Jawa Tengah, namun tidak tampak peran perlindungan tanaman dalam upaya peningkatan pertanian di Kabupaten Sleman, DIY.

Perlindungan tanaman hanya merupakan fungsi dari seksi sarana prasarana tanaman

pangan dan hortikultura. Seksi ini dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi salah satunya penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Keberadaan seksi perlindungan tanaman dalam struktur organisasi akan berpengaruh terhadap adanya pengakuan formal terhadap peran dan fungsi perlindungan tanaman dalam sistem budidaya tanaman.

Semakin tinggi pengakuan formal dari pemerintah daerah terhadap perlindungan tanaman maka semakin tinggi pula peran perlindungan tanaman yang dapat dijalankan. Perlindungan tanaman dinilai oleh pemerintah daerah sebagai bagian penting keberhasilan pembangunan pertanian di daerah tersebut. Pemerintah daerah secara otomatis akan memberikan perhatian lebih tinggi terhadap bidang perlindungan tanaman. Bentuk perhatian pemerintah daerah tersebut diantaranya terkait anggaran kegiatan dan peningkatan sumberdaya manusia perlindungan tanaman.

Menurut Untung (2000), struktur organisasi baru dapat menjadi kendala pelembagaan PHT di lembaga daerah. Dampak tidak langsung dari bentuk struktur organisasi adalah perubahan kinerja petugas. Kelembagaan yang terus berubah menuntut petugas pertanian cepat beradaptasi dengan kondisi lingkungan kerja karena akan mempengaruhi kinerja petugas (Indraningsih *et al.*, 2010).

Otonomi daerah diduga menyebabkan proses pelembagaan dan internalisasi PHT terhambat. Otonomi daerah kadang menjadi penyebab timbulnya konflik antara petugas

pertanian dengan masyarakat dalam penerapan PHT. Konflik seringkali terjadi karena petugas lapangan atau ketua kelompok tani harus melaksanakan dua kebijakan yang berbeda yaitu yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai contoh dalam kasus penanaman padi Hibrida. Teori Kurt Lewin menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari karakteristik individu dan lingkungan. Kondisi di lapangan membuktikan bahwa faktor lingkungan kerja memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku petugas pertanian, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu petugas pertanian itu sendiri. Hal ini terbukti bahwa petugas pertanian seringkali tidak memihak pada kepentingan petani, tetapi lebih mementingkan keinginan pemerintah. Dengan demikian diharapkan petugas pertanian harus mampu menempatkan diri untuk merespon tantangan baru yang muncul dari situasi baru.

B. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Data dan informasi sangat penting dalam

pengambilan keputusan oleh semua *stakeholder* baik di tingkat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Arus data dan informasi dari lapangan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, pusat maupun luar negeri perlu dimantapkan dalam SIM perlindungan yang handal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase pengumpulan data, pelaporan data dan seleksi data dilakukan dengan baik oleh POPT-PHP masing masing 49,1; 50,9; dan 58,2 dengan rerata pencapaian tinggi (Tabel 1).

Pengumpulan data merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan POPT-PHP mengingat data OPT adalah alat untuk menentukan tindakan pengendalian. POPT mengumpulkan data pengamatan secara berkala dua kali sebulan yaitu tanggal 15 dan 30 setiap bulannya. Data pengamatan dikumpulkan ke koordinator POPT kabupaten yang berada di dinas pertanian kabupaten. Data pengamatan ditabulasi oleh koordinator kabupaten dalam waktu 24 jam kemudian segera dilaporkan ke UPT pusat.

Kecepatan dan keakuratan data menjadi tuntutan bagi seorang POPT-PHP terutama koordinator POPT-PHP kabupaten dalam tabulasi data OPT

Tabel 1. Rerata Pencapaian Penerapan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Pengembangan SIM	SS	S	R	TS	STS	Rerata Skor Maks	Rerata Skor Dicapai	Persentase Pencapaian (%)	Kategori
Pengumpulan Data Berkala	49,1	49,1	1,8	0,0	0,0	5	4,47	89,45	Tinggi
Pelaporan Data Berkala	50,9	45,5	1,8	1,8	0,0	5	4,45	89,09	Tinggi
Seleksi Data Berkala	14,5	58,2	10,9	16,4	0,0	5	3,71	74,18	Tinggi
Kemudahan Akses Data OPT	12,7	58,2	10,9	10,2	0,0	5	3,65	73,09	Sedang
							Rerata	81,45	Tinggi

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: SS = sangat setuju, S = setuju, R = ragu, TS = tidak setuju, STS = sangat tidak setuju

karena akan berpengaruh terhadap kecepatan masyarakat dalam mengakses data OPT. Akses data OPT saat ini diakui mudah oleh 58,2% masyarakat responden meskipun rerata pencapaiannya masih perlu ditingkatkan karena termasuk dalam kategori sedang. Masyarakat dapat mengakses data OPT melalui berbagai cara antara lain melalui media massa, elektronik, internet maupun informasi langsung dari Petugas Pertanian. Menurut Bajdwa dan Kogan (2003), penyampaian informasi melalui internet akan meningkatkan peran petugas penyuluh dan petani dalam memperoleh informasi dan pengetahuan guna pengambilan keputusan.

Keberadaan kantor BPP/UPT/UPTD di wilayah kecamatan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait OPT. Meskipun demikian masih ada sebagian petani yang enggan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dengan alasan bahwa petugaslah yang seharusnya aktif memberikan informasi ke petani, bukan petani yang meminta informasi ke petugas di BPP/UPT/UPTD. Hal tersebut sesuai teori yang disampaikan Lipsky (2007) bahwa petugas pertanian sebagai birokrat tingkat bawah (*street-*

level bureaucrats) merupakan petugas terdepan atau ujung tombak dalam memberikan pelayanan, berhubungan langsung dengan petani sebagai “clients”, dan menjamin penerapan kebijakan berjalan dengan baik. Oleh karena itu petugas pertanian sebagai sumber informasi dan sumber data seharusnya dapat memberikan informasi ke petani secara cepat dan akurat. Namun demikian, Subejo (2006) menilai bahwa secara umum peranan Petugas Penyuluhan Pertanian Lapangan di Indonesia sebagai sumber informasi utama dalam penyebaran teknologi baru pertanian mulai menurun. Penelitian Untung (1990) menunjukkan bahwa 40% petani justru mendapatkan informasi pertanian dari penyalur pestisida dan 30% petani mendapatkan informasi dari kios pertanian.

C. Pemantapan Pengamatan dan Peramalan

Pengamatan diarahkan untuk mengetahui jenis OPT, tanaman yang diserang, gejala serangan dan tempat serangan secara cepat, lengkap dan akurat. Hasil pengamatan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengendalian dan tindakan lain yang diperlukan. Pelaksanaan pengamatan saat ini telah berjalan

Tabel 2 Rerata Pencapaian Pelaksanaan Pengamatan dan Peramalan POPT

Pelaksanaan Pengamatan dan Peramalan	SS	S	R	TS	ST	Rerata Skor Maks	Rerata Skor Dicapai	Persentase Pencapaian (%)	Kategori
(%)									
Rutin	76,4	23,6	0	0	0	5	4,76	95,27	Tinggi
Cepat	30,9	54,5	3,6	9,1	1,8	5	4,04	80,73	Tinggi
Lengkap	41,8	50,9	1,8	5,5	0	5	4,29	85,82	Tinggi
Akurat	27,3	65,5	1,8	5,5	0	5	4,15	82,91	Tinggi
Bermanfaat	61,8	36,4	1,8	0	0	5	4,60	92,00	Tinggi
Tepat	34,5	63,6	1,8	0	0	5	4,33	86,55	Tinggi
Rerata								87,21	Tinggi

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: SS = sangat setuju, S = setuju, R = ragu, TS = tidak setuju, STS = sangat tidak setuju

dengan rutin (76,4%), cepat (54,5%), lengkap (50,9%) dan akurat (65,5%)(Tabel 2).

POPT-PHP melakukan pengamatan secara rutin sesuai dengan jadwal bulanan dan pemetaan wilayah pengamatan yang telah dibuat oleh masing-masing POPT-PHP. Pengamatan secara rutin meliputi pengamatan petak tetap dan pengamatan keliling. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekosistem yang meliputi perkembangan komponen-komponen biotik dan abiotik ekosistem. Rutinitas POPT-PHP dalam pengamatan OPT dan faktor pendukung akan mempengaruhi kecepatan tindakan pengendalian OPT apabila harus dilakukan pengendalian.

Beberapa POPT-PHP merasa kewalahan dalam melaksanakan pengamatan rutin karena memiliki wilayah yang terlalu luas. Beban wilayah kerja yang terlalu luas memiliki risiko yang tinggi dalam menjamin kecepatan, kelengkapan dan keakuratan data pengamatan. Oleh karena itu kerjasama antara POPT-PHP dengan petugas pertanian lain dan masyarakat sangat diperlukan. Menurut Untung (2006), secara ideal apabila semua petani dan kelompok tani pernah memperoleh pelatihan pengamatan atau pelatihan PHT di SLPHT, tanggung jawab pemantauan di tingkat lapangan adalah petani beserta kelompoknya. Petugas lapangan dapat memanfaatkan data hasil pemantauan petani yang ada di wilayah pengamatannya untuk menyusun laporan kondisi OPT dan ekosistem di wilayahnya masing-masing. Keberadaan POPT-PHP yang diberi tugas melakukan pengamatan masih diperlukan terutama dalam melakukan koordinasi

kegiatan PHT di daerah atau wilayah kerjanya.

Keberadaan kantor BPP di wilayah kecamatan sangat menguntungkan bagi petugas pertanian. POPT-PHP dapat memperoleh informasi OPT dari Penyuluh Pertanian yang memiliki luas wilayah lebih sempit daripada POPT-PHP maupun informasi langsung dari masyarakat tani. Namun demikian sebagian besar POPT-PHP selalu melakukan pengamatan rutin meskipun tanpa ada laporan dari Penyuluh Pertanian maupun masyarakat. Hal tersebut menjadi tuntutan seorang POPT-PHP yang harus memiliki sifat mandiri, profesional, kreatif dan inovatif.

Informasi yang diperoleh dari kegiatan pengamatan akan dianalisis atau biasa disebut analisis ekosistem. Salah satu tujuan analisis ekosistem adalah mengetahui kondisi ekosistem termasuk populasi hama dan musuh alami. Dengan analisis ekosistem, POPT-PHP dapat melakukan peramalan terhadap dinamika populasi OPT dan musuh alami. Peramalan diarahkan untuk memperkirakan perkembangan serangan OPT baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga dapat diambil tindakan antisipatif yang tepat. Peringatan dini (*early warning system*) sangat perlu untuk dilakukan. Data hasil pengamatan OPT dapat langsung digunakan untuk peramalan terhadap OPT. Hasil peramalan merupakan masukan bagi petani atau petugas pertanian untuk mengambil keputusan tentang bentuk tindakan pengelolaan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi dari POPT-PHP yang diberikan kepada kelompok tani segera

diterapkan di lapangan dalam bentuk tindakan pengelolaan. Masyarakat menilai bahwa hasil pengamatan POPT-PHP sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan berupa rekomendasi dan tindakan pengelolaan yang direkomendasikan oleh POPT-PHP tepat sesuai keadaan di lapangan. Tabel 2 menunjukkan bahwa 61,8% masyarakat setuju apabila kegiatan pengamatan bermanfaat dalam melakukan tindakan aksi dan 63,6% masyarakat puas dengan rekomendasi yang ditawarkan ke petani karena selalu tepat sesuai kondisi lapangan. Tindakan pengelolaan dalam bentuk pengendalian atau pengelolaan ekosistem dapat dilakukan sendiri oleh petani secara perseorangan atau kelompok. Selain langsung dalam bentuk tindakan pengendalian, kegiatan tindakan aksi juga meliputi kegiatan penyuluhan, pengorganisasian petani dan kelompok tani untuk pelaksanaan rekomendasi secara bersama dan serentak.

D. Penyediaan Teknologi Tepat Guna dan Spesifik Lokasi

Masyarakat dan petugas pertanian menilai bahwa jumlah teknologi yang tersedia saat ini melimpah. Masyarakat memiliki peluang yang

besar untuk memilih teknologi yang tepat untuk diadopsi. Selain itu, kecepatan dalam transfer teknologi saat ini dinilai bukan merupakan kendala. Teknologi dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai jalur antara lain melalui kontak langsung dengan petugas pertanian, media cetak dan media elektronik. Namun demikian, keterbatasan sumberdaya manusia pertanian kita dalam hal penerimaan teknologi masih menjadi salah satu kendala. Menurut Untung (2007), proses transfer dan pasyarakatatan teknologi dari para peneliti ke petani ternyata tidak sederhana, harus mengikuti jalur birokrasi dan regulasi pemerintah yang ketat, tidak efisien dan efektif.

Teknologi perlindungan tanaman yang spesifik lokasi dan dapat diterapkan oleh masyarakat dengan mudah, efektif, murah dan aman sangat diperlukan. Teknologi yang tersedia saat ini mudah, murah, efektif, aman dan spesifik lokasi (Tabel 3)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setuju dengan kemudahan (72,7%), kemurahan (47,3%), keefektifan (76,4%), keamanan (36,4%) dan teknologi spesifik lokasi (60%) yang tersedia saat ini. Teknologi pengendalian OPT dianggap mudah oleh petani

Tabel 3. Rerata Pencapaian Ketersediaan Teknologi

Ketersediaan Teknologi	SS	S	R	TS	STS	Rerata Skor Maks	Rerata Skor Dicapai	Persentase Pencapaian (%)	Kategori
Mudah	23,6	72,8	3,6	0	0	5	4,20	84,00	Tinggi
Murah	16,4	47,3	21,8	10,9	3,6	5	3,62	72,36	Sedang
Efektif	12,7	76,4	9,1	1,8	0	5	4,00	80,00	Tinggi
Aman	29,1	36,4	18,2	14,5	1,8	5	3,76	75,27	Tinggi
Spesifik Lokasi	21,8	60,0	9,1	7,3	1,8	5	3,93	78,55	Tinggi
							Rerata	78,04	Tinggi

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: SS = sangat setuju, S = setuju, R = ragu, TS = tidak setuju, STS = sangat tidak setuju

apabila mereka dapat dengan mudah memperoleh teknologi tersebut dan dapat memanfaatkannya dengan atau tanpa bimbingan dari petugas pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat terkait bahwa saat ini masyarakat sangat mudah memperoleh teknologi-teknologi baru karena perangkat teknologi tersebut telah disediakan oleh dinas pertanian dan penerapan teknologi khususnya teknologi tinggi yang dianggap sulit akan mendapatkan pendampingan dari petugas pertanian.

Beberapa petani menyatakan ragu (21,8%) apabila teknologi saat ini dinilai murah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada beberapa teknologi pengendalian yang mahal. Mahal tidaknya suatu teknologi juga tergantung pada tingkat ekonomi petani. Petani yang masih mengandalkan pestisida kimia sebagai bahan pengendali OPT mengatakan teknologi pengendalian saat ini mahal. Padahal, teknologi perlindungan tanaman yang diterapkan sebagian petani masih mengutamakan penggunaan pestisida kimia (Untung, 2006). Namun, petani yang sudah mulai meninggalkan kebiasaan pemakaian pestisida kimia menilai teknologi pengendalian OPT relatif murah. Sebagian petani alumni SLPHT dan petugas pertanian meyakini bahwa teknologi pengendalian sudah tersedia di alam sehingga petani dapat memanfaatkannya dengan murah, mudah dan aman.

Tingkat keamanan penerapan teknologi pengendalian tergantung bagaimana petani mengaplikasikannya di lapangan. Penerapan teknologi pengendalian yang tidak dilakukan

sesuai prosedur akan berdampak buruk terhadap pelaku dan lingkungan. Tabel 3 menunjukkan bahwa masih ada 18,2% masyarakat yang meragukan keamanan teknologi pengendalian yang ditawarkan petugas pertanian bahkan 14,5% menyatakan tidak setuju. Respon masyarakat terhadap teknologi baru yang ditawarkan petugas pertanian merupakan bentuk sikap kehati-hatian masyarakat terhadap dampak negatif yang diakibatkannya. Oleh karena itu, petugas pertanian harus dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas terhadap teknologi baru. Petugas pertanian harus mempunyai wawasan luas terhadap berbagai macam teknologi yang ada. Hal ini menuntut adanya komunikasi antara petugas pertanian dengan peneliti.

E. Penyediaan Sarana Perlindungan

Sarana perlindungan tanaman perlu diusahakan memenuhi kriteria 6 tepat yaitu tepat jenis, mutu, waktu, jumlah, tempat dan harga sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan mudah, efektif, murah dan aman. Masyarakat menilai bahwa sarana perlindungan tanaman yang disediakan saat ini sudah tepat jenis (61,8%), tepat mutu (72,7%), tepat waktu (54,5%) dan tepat harga (60%) (Tabel 4).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada 14,5% masyarakat ragu dengan ketepatan jenis, 18,2% masyarakat ragu dengan ketepatan mutu, 18,2% tidak setuju dengan ketepatan waktu dan 10,9% tidak setuju dengan ketepatan harga. Sarana prasarana perlindungan tanaman yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pusat kadang-kadang tidak sesuai dengan

Tabel 4. Rerata Pencapaian Penyediaan Sarana Perlindungan Tanaman

Penyediaan Sarana	SS	S	R	TS	STS	Rerata Skor Maks	Rerata Skor Dicapai	Persentase Pencapaian (%)	Kategori
	(%)								
Tepat Jenis	18,2	61,8	14,5	5,5	0	5	3,93	78,55	Tinggi
Tepat Mutu	3,6	72,7	18,2	5,5	0	5	3,75	74,91	Tinggi
Tepat Waktu	3,6	54,5	16,4	18,2	7,3	5	3,29	65,82	Sedang
Tepat Harga	7,3	60,0	21,8	10,9	0	5	3,64	72,73	Sedang
							Rerata	73,00	Sedang

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: SS = sangat setuju, S = setuju, R = ragu, TS = tidak setuju, STS = sangat tidak setuju

kebutuhan di lapangan. Selain itu jumlah sarana prasarana perlindungan tanaman yang disediakan oleh dinas belum mencukupi terutama pada saat terjadi ledakan hama yang harus melakukan pengendalian secara serentak di dengan wilayah yang luas. Sebagian besar masyarakat memiliki alat pengendalian sendiri tanpa harus menggunakan alat pengendalian yang disediakan pemerintah sehingga Petani cenderung menggunakan alat pengendalian seadanya yang dimilikinya. Oleh karena itu pihak yang mengetahui baik tidaknya mutu alat pengendalian adalah pemilik alat pengendalian. Beberapa petani mengakui mutu alat pengendalian yang dimiliki sudah tidak baik tetapi tetap menggunakan alat tersebut. Masyarakat menilai tidak semua sarana pengendalian yang disediakan pemerintah memiliki kualitas baik bahkan sebagian masyarakat mengatakan bahwa sarana pengendalian pemerintah biasanya cepat rusak.

Penyediaan sarana prasarana pemerintah juga dinilai tidak tepat waktu sehingga berdampak terhadap meluasnya serangan OPT. Keterbatasan sarana transportasi POPT-PHP mengakibatkan terlambatnya pengambilan sarana prasarana

pengendalian yang berada di kantor dinas kabupaten. Keterbatasan tenaga operasional juga menjadi faktor penyebab keterlambatan penyediaan sarana prasarana pengendalian. Hasil wawancara dengan pejabat terkait bahwa penyediaan sarana prasarana pengendalian tidak selalu terlambat. Sarana prasarana pengendalian sudah tersedia di kantor dinas kabupaten sehingga apabila diperlukan dapat diambil kapanpun. Dalam hal ini, petani diharapkan ikut proaktif mengingat yang berhak mengambil sarana prasarana pengendalian di dinas kabupaten adalah kelompok tani atas rekomendasi POPT-PHP.

F. Pemantapan Gerakan Pengendalian

Fasilitas sarana prasarana pengendalian yang diberikan pemerintah daerah sebesar 60% lebih besar daripada pemerintah pusat sebesar 43,6% (Tabel 5). Meskipun demikian, peran keduanya tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan rerata pencapaian sangat tinggi masing-masing 85,09% dan 76,73%. Penelitian ini dilakukan 2 tahun setelah ledakan WBC tahun 2010 sehingga tampak peran pemerintah pusat hampir sama dengan pemerintah daerah meskipun tanggung jawab pemerintah daerah lebih besar

daripada pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah maka peran pemerintah daerah harus lebih besar daripada peran pemerintah pusat. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat meliputi berbagai jenis pestisida, alat pengendalian berupa penyemprot dan benih varietas tahan wereng.

saat ini diantaranya Regu Pengendali Hama, Ikatan Petani Pemandu PHT, Ikatan Petani PHT Indonesia, dan Pos Pelayanan Agens Hayati.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran birokrasi kelembagaan dalam penerapan PHT di Jawa bagian tengah belum

Tabel 5. Rerata Pencapaian Pemantapan Gerakan Pengendalian

Gerakan Pengendalian	SS	S	R	TS	STS	Rerata Skor Maks	Rerata Skor Dicapai	Persentase Pencapaian (%)	Kategori
Pemerintah Pusat	43,6	43,6	7,3	5,5	0	5	4,25	85,09	Tinggi
Pemerintah Daerah	18,2	60,0	9,1	12,7	0	5	3,84	76,73	Tinggi
Motivasi Gerakan Pengendalian	7,3	56,4	16,4	20,0	0	5	3,51	70,18	Sedang
Rerata								77,33	Tinggi

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: SS = sangat setuju, S = setuju, R = ragu, TS = tidak setuju, STS = sangat tidak setuju

Gerakan pengendalian OPT di lapangan pada dasarnya tanggung jawab petani. Oleh karena itu pelaksanaan pengendalian OPT di lapangan oleh petani baik secara individual maupun massal sangat penting ditingkatkan dan dimantapkan. Pemerintah memotivasi, memfasilitasi dan memberikan bantuan apabila terjadi eksplosif. Tindakan pengendalian harus sesuai prinsip-prinsip PHT dan diusahakan bersama-sama, tidak parsial. Peranan pemerintah daerah terutama kabupaten/kota sangat besar artinya dalam memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dapat melaksanakan pengendalian dengan baik.

Apabila terjadi serangan OPT, gerakan pengendalian dilakukan bersama-sama antara petani beserta kelembagaan kelompoknya dan pemerintah. Beberapa lembaga petani yang ada

optimal karena lemahnya kerjasama dan koordinasi antar stakeholder serta belum mapannya struktur organisasi baik baik pusat maupun daerah sebagai dampak kebijakan otonomi daerah. Perlu upaya kerjasama dan jejaring baik tingkat lokal, nasional maupun global. Kerjasama dan jejaring akan memberikan tambahan informasi sebagai dampak dari kegiatan saling tukar informasi terkait PHT.

DAFTAR PUSTAKA

Bajwa, W.I dan Marcos, K. 2003. Online Resources for Integrated Pest Management Information Delivery and Exchange. In K.M. Mareda, D. Dakouo and D. Mota-Sanchez (eds) *Integrated Pest Management in The Global Arena*.

- CAB International. 9-18.
- Brannen, J. 1997. *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 226p.
- Departemen Pertanian. 1986. *Instruksi Presiden No. 3 tahun 1986 tentang Pengendalian Hama Wereng Coklat Padi*.
- Departemen Pertanian. 1992. *UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman*.
- Departemen Pertanian. 1995. *PP No 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman*.
- Indraningsih, K.S., B.G. Sugihen, P. Tjitropranoto, P.S. Asngari., dan H. Wijayanto. 2010. *Kinerja Penyuluh dari Perspektif Petani dan Eksistensi Penyuluh Swadaya sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian*. Analisis Kebijakan Pertanian. 8 (4): 302-321.
- Lipsky, M. 2007. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. In Wilson Wong (eds) *Politics of Policy Making and Implementation*. Book Report.
- Martono, E. 2006. *SLPHT sebagai Lembaga Pemberdayaan Petani*. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian. 2(1): 1-5p
- Subejo. 2006. *Penyuluhan Pertanian Indonesia di Tengah Isu Desentralisasi, Privatisasi dan Demokratisasi*. Jurnal Penyuluhan. 2 (2): 69-76p
- Sugiyono. 2004. *Statistik Nonparametrik untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung. 158p
- Untung, K. 1990. *Penggunaan Pestisida oleh Petani Tanaman Pangan di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 1989*. http://i_lib.ugm.ac.id. Diunduh tanggal 3 April 2011
- Untung, K. 1996. *Institutional Constraints on IPM Implementation in Indonesia*. In Waibel, H and J.C. Zadoks (eds). *Institutional Constraints to IPM Publication*. No 3 the Pesticide Policy Project. Hannover
- Untung, K. 2000. *Pelembagaan Konsep Pengendalian Hama Terpadu di Indonesia*. Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia. 6(1): 1-8p
- Untung, K. 2007. *Kebijakan Perlindungan Tanaman*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 256p